



# 2019

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN)



**BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Belitung No. 4 Komplek  
Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung  
Kel. Air Itam Telepon (0717) 439426,  
439429 /Fax (0717) 439427



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, yang mana penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2019.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 ini ada beberapa kesalahan ataupun kekurangan yang akan diperbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja (LAKIN) Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan

semakin memacu kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasa yang akan datang.

Pangkalpinang, Februari 2019 ✓  
✓  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**FERI AFRIYANTO**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19700409 199603 1 004**





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	3
2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .....	3
2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2019.....	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
3.1. Capaian Kinerja .....	7
3.1. Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP.....	28



# **BAB 1**

## **Pendahuluan**

**BAB I Berisi :**

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Selain itu Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang keuangan yang menjadi kewenangan provinsi;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
4. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang keuangan;
5. Penyelenggaraan administrasi Badan Keuangan Daerah.



Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengambilan kebijakan dibidang keuangan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi isu strategis yang berkembang selama tahun 2019. Adapun masalah yang menjadi isu strategis selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya penerimaan pendapatan asli daerah dalam mendukung anggaran pendapatan dan belanja daerah, hal ini dapat dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah pada pendapatan daerah yang masih dibawah 40 % (data realisasi tahun 2019 : 30.83 %);
2. Belum tersinerginya pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, dimana masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang belum melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Belum terlaksananya tata kelola Barang milik daerah secara optimal, sehubungan dengan belum kompetennya Sumber Daya Manusia dalam masa transisi penyerahan kewenangan pemerintahan daerah;
4. Masih belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum definitif.



# BAB 2

## Perjanjian Kinerja

### BAB II Berisi :

1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

### 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sasaran strategis merupakan gambaran singkat mengenai sasaran strategis yang ingin diraih, dan bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi yang dapat dijabarkan dalam tabel sasaran strategis dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian					
			SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	84,8 5%	87,3 2%	87,5 2%	88,19 %	88,82 %
2	Meningkatkan kontribusi redistribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD	%	15,1 5%	12,6 8%	12,4 8%	11,81 %	11,18 %



3	Meningkatkan kualitas penata usaha, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	Prosentase penata usaha, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	%	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan kewajaran nilai asset daerah yang disajikan dalam laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya	Nilai	4.63 3.23 8.27 8.09 3,17	4.92 9.40 3.05 3.58 7,66	5.24 4.49 9.20 4.71 5,99	5.579. 736.85 8.451, 54	5.936 .403. 495.2 21,56
5	Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD perubahan provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD perubahan provinsi dan Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
6	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	Nilai	79,0 0	80,2 5	81,5 0	82,75	84,00

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu



berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2019:

Tabel 2.2

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	6	
1	Meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	87,32 %	program peningkatan tata kelola pendapatan pajak daerah	Rp 6.577.466.000
2	Meningkatkan kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD	12,68 %	program peningkatan tata kelola pendapatan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain	Rp 124.399.250
3	Meningkatkan kualitas penata usahaan, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	prosentase penata usahaan, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	100 %	program peningkatan pelayanan verifikasi dan perbendaharaan	Rp 298.132.000
				program peningkatan pelayanan akuntansi dan pelaporan	Rp 411.443.000
4	Meningkatkan kewajaran nilai	nilai aset daerah Provinsi	Rp 4.929.403	program peningkatan tata kelola asset daerah	Rp 1.109.194.000



	asset daerah yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya	.053.587,66		
5	Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	program penganggaran pembangunan daerah	Rp 1.054.225.000
6	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	80,25 (Mutu Pelayanan Kategori B, Menurut Permenpan No.14 Tahun 2017	program peningkatan tata kelola pendapatan pajak daerah	Rp 6.577.466.000



# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### BAB III Berisi :

1. Capaian Kinerja
2. Realisasi Anggaran

### 3.1. Capaian Kinerja

Laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan pengukuran, evaluasi kinerja dan pengungkapan secara memadai sesuai Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tingkatcapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dengan realisasinya, yaitu seperti formulasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = ( \text{Realisasi} / \text{Rencana} ) \times 100 \%$$

Capaian kinerja lebih lanjut dapat dinilai dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Nilai Kinerja	Kode Warna
1.	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	



5.	≤ 50	Sangat Rendah	
----	------	---------------	--

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Belitung sebesar **95.01 %** dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari kelima sasaran kinerja yang ditetapkan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dinyatakan **"berhasil"** dengan Kategori Nilai Kinerja "Sangat Tinggi", interval nilai kinerja di atas **91%**.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan. Capaian kinerja sendiri diukur dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Sasaran : Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

##### Indikator Kinerja : Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Dalam upaya pencapaian sasaran meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, indikator kinerja yang menjadi dasarnya yaitu " prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD" untuk mengukurnya. Untuk capaian kinerja atas sasaran "meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD" pada tahun 2018 menggunakan indikator kinerja utama yang baru berdasarkan hasil coaching dengan tim dari Kemenpan RB RI yang mana di targetkan sebesar 84,85 % dengan capaian sasaran indikator kinerja tahun 2018 sebesar 92,54 %. Sedangkan untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar 87,32 % dengan capaian sasaran indikator kinerja sebesar 91,42 %.

Berikut ini hasil pengukuran capaian kinerja tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1.1**

#### Capaian Indikator Kinerja

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian Nilai	Tahun 2019		Capaian Nilai
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Pajak Daerah	%	84,85	92,54	109,06	87,32	91,42	104,69



	terhadap PAD							
Rata-Rata								

Target prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2019 menurun sebesar 1,12 % jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai nilai persentase sebesar 92,54% atau terealisasi sebesar 91,42%. Namun jika dibandingkan dengan target menengah (tahun ke-3/2020) Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang menargetkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 87,52 %, maka capaian tahun 2019 melebihi target sebesar 3.90 %. Untuk pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyumbang kontribusi sebesar Rp 760.996.591.832,42 (tujuh ratus enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua koma empat puluh dua rupiah ) dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp 832.458.792.350,11 (delapan ratus tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh koma sebelas rupiah). Secara nominal realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah ini hanya mencapai angka 96.31% dari target Pendapatan Pajak Daerah pada APBD Perubahan 2019 sebesar Rp. 790.139.435.584,04 ( tujuh ratus Sembilan puluh milyar serratus tiga puluh Sembilan juta wmpat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat koma nol empat rupiah).

Tercapainya target Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

- a. Meningkatkan intensifikasi pada sumber-sumber pajak daerah;
- b. Peningkatan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis, dengan adanya Kegiatan Samsat Setempoh sebagai program inovasi Badan Keuangan Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun program yang bertanggungjawab terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama ini adalah Bidang Pajak Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan pagu total program peningkatan tata kelola pajak daerah sebesar Rp 6.982.981.000,00 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta



sembilan ratus delapan puluh satu riburupiah) terealisasi sebesar Rp 5.578.910.485,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 79.89 % .Kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 13 (tigabelas) kegiatan.

## 2. Sasaran : "Meningkatkan kontribusi retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD"

### Indikator Kinerja "Prosentase kontribusi retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD"

Selain pajak daerah, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengkoordinasikan bagian Pendapatan Asli Daerah, antara lain : Retribusi Daerah, Pendapatan dari Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan kontribusi pendapatan retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 12,68 %. Walaupun Badan Keuangan Daerah hanya berfungsi sebagai koordinator dan regulator terhadap pendapatan PAD selain pajak daerah ini, namun tetap memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

Tabel berikut menyajikan target sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2**

### Capaian Indikator Kinerja

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2019		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah	prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap	%	15,15	7,46	49,24	12,68	8,58	67,70



terhadap PAD	PAD							
<b>Rata-Rata</b>								

Capaian realisasi prosentase kontribusi retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD pada tahun 2019 meningkat sebesar 1.12 % jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai nilai persentase sebesar 7.46 %. Namun jika dibandingkan dengan target menengah (tahun ke-3/2020) renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang menargetkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 12.48 %, maka capaian tahun 2019 kurang dari target sebesar 3.9%. Retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tProvinsi Kepulauan Bangka Belitung menyumbang kontribusi sebesar Rp 71.462.200.518,00 (tujuh puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu lima ratus delapan belas rupiah) dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 832.458.792.350,11 (delapan ratus tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh koma sebelas rupiah).

Tidak tercapainya target retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

- a. Kecilnya pendapatan dari pengembalian Bendahara Pengeluaran yang hanya terealisasi sebesar 4.43%, namun hal ini mengindikasikan semakin baiknya pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Tidak tercapainya target pada retribusi perpanjangan IMTA dikarenakan banyak industri pertimahan / smelter tutup dikarenakan produksinya menurun yang mana banyak tenaga kerja asing pulang kembali ke negara asalnya.

Adapun program yang bertanggungjawab terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama ini adalah bidang retribusi dan LLPADS Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Pagu Total Program Peningkatan Tata Kelola Retribusi Daerah dan LLPADS sebesar Rp124.399.250,00(seratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar



Rp 52.089.000,00 (rupiah) atau sebesar 41,87%. Kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 5 (lima) kegiatan.

**3. Sasaran : Meningkatkan kualitas penatausahaan, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan**

**Indikator Kinerja : Prosentase penatausahaan, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan dan Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai sasaran Peningkatan Kualitas Penatausahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian Indikator Kinerja**

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2019		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	Prosentase Penatausahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	%	100	100	100	100	88,89	88,89



Rata-Rata				-			
-----------	--	--	--	---	--	--	--

Target Indikator Kinerja Utama Prosentase Penatausahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini didukung oleh capaian Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan yang mencapai realisasi target program sebesar 77.78 % dan capaian Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi yang merealisasikan target capaian sebesar 100 %.

Tidak tercapainya target pada Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan ini dikarenakan masih banyaknya OPD yang dalam menyampaikan laporan keuangannya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mencapai besaran 22.22%.

**4.Sasaran : Meningkatkan kewajaran nilai asset daerah yang disajikan dalam laporan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Indikator Kinerja : Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya**

Sebagai leading sektor pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas dalam pengelolaan asset. Nilai asset daerah yang diyakini kewajarannya merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Nilai asset ini mencerminkan kinerja yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berikut merupakan capaian yang diraih dalam tahun 2019 :

Tabel 3.1.4

## Capaian Indikator Kinerja

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2019		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatkan kewajaran nilai asset daerah yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya	nilai	4.633.238.278.093,17	5.527.109.252.101,10 -	119,29	4.929.403.053.587,66	5.254.997.715.052,53	106,61



	a							
Rata-Rata					-			

Pada tahun 2019 tercatat nilai asset yang diyakini kebenarannya sebesar Rp 5.254.997.715.052,33 (lima triliun dua ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu lima puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah) atau naik sebesar Rp 325.594.661.465 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus puluh lima rupiah) dari target yang ditetapkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 4.929.403.053.587,66 (empat trilyun Sembilan ratus dua puluh Sembilan milyar empat ratus tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam rupiah) atau dengan kata lain capaian pada tahun 2019 sebesar 106,61 %.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada medio renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tahun ke – 3/2020) tercatat pada target Renstra sebesar Rp. 5.244.499.204.715,99 (Lima trilyun dua ratus empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima belas koma sembilan puluh sembilan rupiah), capaian tahun 2019 telah melampaui target dimaksud.

Capaian target ini tidak lepas dari kerja keras program peningkatan tata kelola asset daerah dalam melakukan penatausahaan asset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Walaupun dalam Audit laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 masih terdapat nilai Nilai asset yang dianggap belum memadai terhadap Pencatatan asset tetap tanah dengan luas 0.00 M2.

#### **5. Sasaran : Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota**

##### **Indikator Kinerja : prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD perubahan provinsi dan kabupaten/kota**

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung. Ketepatan waktu penetapan APBD menjadi isu strategis yang penting dalam mencapai sasaran yang ingin di capai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain itu evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota juga menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut merupakan capaian Indikator Kinerja Utama prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD perubahan provinsi dan kabupaten/kota:

Tabel 3.1.5

## Capaian Indikator Kinerja

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Tahun 2019		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	91,97	91,97	100	96,07	96,07
Rata-Rata					-			96,07

Pada bagian penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 100.00%, sedangkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan kabupaten/kota tahun 2019 dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tahun 2020 tercatat nilai sebesar 92.14% sehingga capaian Indikator Kinerja Utama prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD perubahan provinsi dan kabupaten/kota adalah sebesar 96.07 %. Dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang dievaluasi, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tertinggi ada pada Kabupaten Bangka Barat dengan persentase 97.5 % dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur dengan capaian 82.5 %. Dari 10 unsur yang dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



setidaknya ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan peraturan diantaranya adalah :

- a. Penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA)/Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS;
- b. Kesepakatan bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan KUA/KUPA dan PPAS;
- c. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD) dan Penyusunan/pembahasan RKA
- d. Penyampaian rancangan peraturan daerah APBD/Perubahan ke DPRD.

Dari seluruh capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya" terealisasi paling tinggi yaitu sebesar 106,11 % sedangkan Indikator Kinerja Utama "prosentase kontribusi retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD" menempati posisi paling rendah dengan nilai capaian sebesar 67,70 %.

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama ini rata-rata realisasi adalah sebesar **95,01 %**. Capaian kinerja yang **Sangat Baik** karena realisasi di atas 91.00%.

Tabel berikut menyajikan rangkuman capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 :

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
<b>Tujuan Renstra PD 1 :</b>				
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah			
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 1. :</b>				



90,08

103,16

Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	87,32 %	91,42 %	104,69 %
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 2. :</b>				
Meningkatkan kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD	12,68 %	8,58 % 91,9	67,70 % 72,48
<b>Tujuan Renstra PD 2 :</b>				
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	DALAM PROSES AUDIT	
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 3. :</b>				
Meningkatkan kualitas Penata usahaaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	Prosentase Penata usahaaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	100 %	88,89 %	88,89 %
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 4. :</b>				
Meningkatkan kewajaran nilai aset daerah yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya	4.929.403.053.587,66	5.254.997.715.052,53	106,61 %
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 5. :</b>				
Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	96,07 %	96,07 %
<b>Tujuan Renstra PD 5 :</b>				
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 6. :</b>				
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	80,25 %	85,15 %	106,11 %
<b>RATA-RATA</b>				<b>95,01 %</b>

Sedangkan pada capaian Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung capaian rata-rata indikator program adalah sebesar 92,50 %, indikator kinerja program peningkatan tata kelola pendapatan, retribusi daerah dan pendapatan lain – lain yang sah dengan indikator kinerja prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS” mencapai realisasi tertinggi yaitu dari target sebesar 5.03 % terealisasi sebesar 12.73 %, sehingga capaian Indikator Kinerja Program sebesar 253.06 %. Sedangkan indikator kinerja program peningkatan tata kelola pendapatan pajak daerah dengan indikator



kinerja prosentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah menempati posisi paling rendah, dari target sebesar 4.78 % dengan capaian realisasi Indikator Kinerja Program menurun sebesar -3.33 % atau terealisasi sebesar -69.63 %.

Tabel berikut menyajikan capaian Program yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 :

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Program  
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2019**

PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI	
		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Keseekretariatan	100 %	19.942.007.257,00	76,39 %	17.560.732.250,00	76,39 %	88,05 %
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (AA=90-100, A=80-90, BB=70-80, B=60-70, CC=50-60, C=40-50)	74,00		78,70		106,35 %	
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah	4,78 %	6.982.981.000,00	-3,33 %	5.578.910.485,00	-69,63 %	79,89 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	79,50		83,76		105,36 %	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap Jasa Lainnya Badan Keuangan	81,00		86,54		106,84 %	



	Daerah						
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah	Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS	5,03 %	124.399.250,00	12,73 %	52.089.000,00	253,06 %	41,87 %
Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100 %	298.132.000,00	100%	117.246.300,00	100 %	39,33 %
Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	100 %	411.443.000,00	77,78%	290.600.000,00	77,78 %	70,63 %
Program Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah	persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan	100%	1.150.234.200,00	76,47 %	692.103.285,00	76,47 %	60,17 %
	persentase nilai asset yang dimanfaatkan terhadap seluruh nilai asset daerah	0,27 %		0,23 %		85,28 %	
Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi	100 %	1.101.363.800,00	100 %	745.060.900,00	100 %	67,65 %
	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	100 %		92,14 %		92,14 %	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM			30.010.560.507		25.036.742.220,	92,50 %	83,43 %

Sedangkan pada capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 50 (lima puluh) kegiatan capaian rata-rata indikator kinerja kegiatan adalah sebesar 97.10 %.

Indikator kinerja kegiatan sosialisasi penatausahaan keuangan pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai realisasi tertinggi yaitu dari target



sebanyak 100 orang dan terealisasi sebanyak 124 orang yang berarti realisasi persentasenya sebesar 124 % dengan output kegiatan jumlah peserta sosialisasi penatausahaan keuangan. Sedangkan capaian terendah terletak pada kegiatan penyusunan raperda tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah. Realisasi kegiatan sebesar 0 % dikarenakan Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung tidak dapat membuat Raperda tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah sebagai peraturan pelaksana atas Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah belum ada penggantinya sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel berikut menyajikan capaian Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 :

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan  
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2019**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH</b>				
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12	12	100,00%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100 %	100 %	100,00 %



Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat	28 orang	18 orang	64,29 %
Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA	Jumlah bulan layanan Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA	12	12	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	3	3	100,00%
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7	7	100,00%
<b>Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah</b>				
Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah melalui PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan, PPBKB dan Pajak Rokok	760.996.591.832,4 2	703.658.305.5 00	108,15 %
Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	12	12	100,00%
Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	2 kali	2 kali	100,00 %
Penyusunan regulasi/kebijakan bidang tata kelola pajak daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun	3	3	100,00%



Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kota pangkalpinang	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kota pangkalpinang	12	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	12	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	12	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	12	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	12	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	12	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur	12	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	12	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	12	12	100,00%
Sosialisasi pajak daerah	Jumlah peserta sosialisasi Perda Pajak Daerah; jumlah spot	30	30	100,00 %



	sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik; jumlah hari pameran yang diikuti			
<b>Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah</b>				
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	jumlah Perangkat Daerah dan pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain	45	45	100,00%
Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah penyelenggaraan Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	1 kali	1 kali	100,00%
Rapat kerja retribusi daerah dan pendapatan lain - lain	Jumlah Penyelenggaraan rapat kerja	10 kali	10 kali	100,00%
Tim peningkatan pengawasan pendapatan daerah	Laporan hasil pengawasan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	2	100,00%
Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah	Jumlah peraturan gubernur tentang tata cara pengelolaan retribusi dan pendapatan lain – lain yang sah	1	1	100,00 %
<b>Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi</b>				
Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	120	109	90.83 %
Sosialisasi Penatausahaan Keuangan	Jumlah peserta sosialisasi	100	124	124,00 %
Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan	4	4	100,00%



Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	Jumlah bulan layanan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	12	12	100,00%
<b>Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan</b>				
Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	7	7	100,00%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	1	100,00%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	100,00%
Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dalam Penyusunan Laporan Keuangan	1	1	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	12	12	100,00%
<b>Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah</b>				
Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	2	100,00%
Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi	1	1	100,00%



	Kepulauan Bangka Belitung			
Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	105	120	114,29 %
Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	Jumlah bulan layanan sistem Aplikasi SIMDA ter-update	12	12	100,00%
Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20	14	70,00 %
Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	2	2	100,00%
Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan	1	1	100,00%
Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga	1	1	100,00%
Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	1	100,00%
<b>Program Penganggaran Pembangunan Daerah</b>				
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan	4	4	100,00%



Gubernur Tentang APBD	Peraturan Gubernur Tentang APBD			
Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	200	174	87,00 %
Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	4	4	100,00%
Penyusunan regulasi/kebijakan bidang anggaran	Jumlah peraturan tentang regulasi / kebijakan bidang anggaran	1	1	100,00 %
Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	14	14	100,00%
Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8	8	100,00%
Penyusunan Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah raperda tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah	1	0	0,00 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN</b>				<b>97,10 %</b>

### 3.2.REALISASI ANGGARAN

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan strategis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah sebesar 86.96 %. Dari anggaran perubahan sebesar Rp 30.010.560.507,00 (tiga puluh milyar sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh rupiah) teralisasi sebesar Rp 25.036.742.220,00 (dua puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).



Capaian realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mencapai 88.05 %. Dari pagu anggaran sebesar Rp 19.942.007.257,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) teralisasi sebesar Rp 17.560.732.250,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Sedangkan capaian realisasi anggaran terendah dicapai oleh program peningkatan fungsi perbendaharaan dan verifikasi. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 298.132.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp 117.246.300,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau hanya terealisasi sebesar 39.33 %.



# BAB 4

## Penutup

**BAB IV Berisi  
Kesimpulan dari hasil  
Penyusunan Laporan  
Akuntabilitas Kinerja  
(LAKIN) BAKUDA TA. 2018**

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2019. Pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, mencakup pengukuran pencapaian sasaran strategis (Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pencapaian Indikator Kinerja Program, dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Dari uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disimpulkan antara lain :

1. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum telah mencapai sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama dengan kategori **"SANGAT BAIK"** (nilai capaian 95.01%);
2. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Peningkatan koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan terus ditingkatkan;
4. Peningkatan pelayanan publik akan terus ditingkatkan dengan memperhatikan ketercukupan sumber daya manusia yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana pada Unit Pelaksana Teknis serta pelayanan prima kepada masyarakat;



5. Untuk peningkatan pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif dan berhasil guna diperlukan penyatuan dan pemahaman visi dan misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 ini disampaikan, dan semoga dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas selanjut agar menjadi lebih baik, terima kasih.

**Pangkalpinang, Februari 2019**

**✓ KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ✓**



**FERI AFRIYANTO  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19700409 199603 1 004**